

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Koperasi**

Koperasi menurut Hasmawati (2013) dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha kolektif yang didirikan oleh individu yang memiliki kepentingan bersama. Koperasi ini dijalankan dan dikelola bersama-sama, dengan dasar-dasar yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau entitas hukum lain, yang memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan bisnis, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi disahkan sebagai badan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Koperasi diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Dalam pasal 37 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengurus koperasi berkewajiban untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
2. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
3. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
4. laporan Pengawas;
5. nama Pengawas dan Pengurus; dan

6. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus tersebut harus disusun berdasarkan standar keuangan yang berlaku bagi koperasi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

## **2.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) adalah suatu alat bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi atas perusahaan tersebut, kepada pihak luar. Informasi yang disampaikan memberikan gambaran historis yang dinyatakan dalam satuan moneter. Menurut SAK ETAP (2009), laporan keuangan menunjukkan tanggung jawab manajemen suatu entitas terhadap sumber daya yang dipercayakan pada mereka dalam mencapai tujuan entitas. Menurut Gibson (2009), laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pengguna eksternal maupun internal sebagai dasar untuk pengambilan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan yang bersangkutan, maupun kepentingan perusahaan.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018), laporan keuangan yang umum disediakan oleh suatu entitas usaha terdiri dari: 1) laporan posisi keuangan, 2) laporan laba rugi (atau laporan laba rugi komprehensif), 3) laporan arus kas, dan 4) laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan. Pelaporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik terstandar dalam SAK ETAP (2019), terdiri dari: 1) neraca, 2) laporan laba rugi, 3) laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, 4) laporan arus kas, dan 5) catatan atas laporan keuangan.

### **2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Menurut SAK ETAP (2009) SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dirancang khusus untuk diadopsi oleh entitas yang tidak tergolong sebagai akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik tersebut diartikan sebagai entitas yang tidak memiliki signifikansi dalam akuntabilitas publik, dan mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum yang ditujukan untuk pengguna eksternal. Pengguna eksternal tersebut antara lain meliputi pemilik yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

### **2.4 Laporan Keuangan dalam SAK ETAP**

Menurut SAK ETAP (2009) SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dirancang khusus untuk diadopsi oleh entitas yang tidak tergolong sebagai akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik tersebut diartikan sebagai entitas yang tidak memiliki signifikansi dalam akuntabilitas publik, dan mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum yang ditujukan untuk pengguna eksternal. Pengguna eksternal tersebut antara lain meliputi pemilik yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

#### **2.4.1 Karakteristik laporan keuangan menurut SAK ETAP**

Laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009) mengandung informasi yang memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Mudah dipahami adalah kualitas yang penting untuk dimiliki sebuah laporan keuangan. Pengguna informasi diasumsikan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi tersebut secara cermat. Namun, informasi yang relevan tetap harus diprioritaskan dari pada mengutamakan kemudahan pemahaman bagi pengguna tertentu yang dianggap sulit untuk memahami informasi tersebut. Karakteristik dapat dipahami berarti kualitas informasi berkaitan dengan cara penyajian yang memungkinkan pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta keinginan untuk belajar informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar dapat memahaminya.

## 2. Relevan

Untuk mencapai manfaat yang efektif, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat dinilai relevan jika informasi tersebut dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini dan depan untuk digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Informasi juga harus dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu.

## 3. Materialitas

Dalam laporan keuangan, informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Materialitas tersebut bergantung pada besarnya pos atau

kesalahan yang dianggap penting dalam situasi tertentu dari kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi. Namun, tidaklah tepat untuk sengaja membuat atau membiarkan kesalahan yang tidak terlalu berdampak agar sesuai dengan persyaratan SAK ETAP dalam penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

#### 4. Keandalan

Untuk mencapai manfaat yang efektif informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas yang andal. Informasi tersebut dapat dinilai andal jika terbebas dari kesalahan materialitas maupun bias, serta harus disajikan secara jujur atau wajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, laporan keuangan tidak dianggap bebas dari bias jika tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan dengan tujuan mencapai hasil tertentu melalui pemilahan atau penyajian informasi.

#### 5. Substansi mengungguli bentuk

Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya mengikuti bentuk hukumnya. Dalam hal ini, keandalan laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan pencatatan dan penyajian informasi dengan situasi ekonomi yang sebenarnya terjadi, bukan hanya mengikuti aspek hukum formal semata.

#### 6. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan memerlukan perhatian khusus atas adanya ketidakpastian akibat adanya berbagai peristiwa dan kondisi yang dipahami

atas dasar pengungkapan sifat dan penjelasan atas peristiwa dan kondisi tersebut serta melalui pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat berarti pertimbangan dalam keadaan tidak pasti yang mengandung unsur kehati-hatian, sehingga penyajian aset, penghasilan, kewajiban dan beban tidak disajikan lebih maupun kurang dari nilai seharusnya. Dalam intinya, penggunaan pertimbangan hati-hati harus dilakukan secara obyektif dan tidak boleh memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak tertentu.

#### 7. Kelengkapan

Untuk menjadi andal, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan haruslah lengkap dalam batas-batas materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak memberikan pengungkapan yang cukup akan menyebabkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan dengan demikian menjadi tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi dalam hal relevansi.

#### 8. Dapat dibandingkan

Agar pengguna dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, laporan keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan entitas antar tiap periode serta entitas berbeda. Untuk memenuhi kriteria tersebut, laporan keuangan atas transaksi dan peristiwa serupa harus disajikan secara konsisten dalam suatu entitas, antar periodenya dan untuk entitas yang berbeda. Pengguna laporan keuangan juga harus mendapat informasi berkaitan dengan ketentuan dan kebijakan akuntansi

yang digunakan, diubah, serta dampak perubahannya dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

#### 9. Tepat waktu

Untuk menjadi relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Relevansi juga melibatkan pelaporan informasi dalam waktu yang tepat sehingga informasi tersebut masih memiliki pengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil. Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan, maka informasi tersebut akan kehilangan relevansinya. Namun, manajemen harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterlambatan pelaporan dan keandalan informasi yang diberikan. Pertimbangan utama dalam mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan adalah memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan informasi tersebut. Evaluasi atas manfaat dan biaya yang dikeluarkan tersebut adalah proses pertimbangan yang substansial. Biaya yang dikeluarkan tidak dibebankan pada pengguna informasi sebagai pihak yang menikmati manfaat. Dalam mengevaluasi manfaat dan biaya penyediaan informasi, entitas harus paham bahwa manfaat informasi yang disediakan juga dapat dinikmati oleh pengguna eksternal.

### 2.4.2 Penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP

Menurut SAK ETAP (2009) Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas suatu entitas. Dalam penerapan SAK ETAP, penyajian yang wajar dicapai dengan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi yang sesuai dengan definisi dan kriterianya. Laporan keuangan dapat disajikan secara wajar dengan pengungkapan tambahan yang diperlukan jika persyaratan dalam SAK ETAP tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang memadai bagi pengguna laporan keuangan terkait pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Entitas yang menyusun laporannya dengan mengikuti SAK ETAP harus membuat pernyataan yang jelas dan penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut. Pernyataan tersebut dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan minimal setahun sekali, selama entitas dinilai masih memiliki kemampuan melanjutkan usaha. Laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang terdapat pada SAK ETAP.

Entitas juga disyaratkan untuk menyajikan laporan keuangan secara komparatif, yang berarti suatu entitas wajib menyajikan informasi yang mengandung paling sedikit dua periode pelaporan, baik secara naratif maupun deskriptif. Laporan keuangan juga harus disusun dengan memperhatikan materialitas pos-pos yang terkandung di dalamnya, jika suatu pos dinilai tidak memiliki materialitas, pos tersebut dapat digabungkan menjadi satu sesuai dengan sifat dan fungsi yang sejenis, begitu pula sebaliknya.

### 2.4.3 Jenis-jenis laporan keuangan dalam SAK ETAP

Menurut SAK ETAP (2009) laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang lengkap terdiri dari:

#### 1. Neraca

SAK ETAP tidak mengatur secara khusus format maupun urutan penyajian pos-pos yang disajikan dalam neraca, namun SAK ETAP mengatur informasi minimal yang disajikan dalam neraca. Adapun informasi tersebut mencakup pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. persediaan;
- d. properti investasi;
- e. aset tetap;
- f. aset tidak berwujud;
- g. utang usaha dan utang lainnya;
- h. aset dan kewajiban pajak;
- i. kewajiban diestimasi;
- j. ekuitas.

Entitas diharuskan untuk menyajikan aset dan kewajiban secara terpisah dalam kualifikasi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan sifatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih andal dan relevan mengenai likuiditas dari entitas.

Aset yang dikualifikasikan sebagai aset lancar adalah aset yang diestimasikan akan direalisasikan/dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu normal siklus operasi entitas, dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau berupa kas/setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau untuk digunakan untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo minimal 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Entitas menyajikan aset lainnya sebagai aset tidak lancar.

Kewajiban yang memiliki kualifikasi sebagai kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diestimasi akan dilunasi dalam jangka waktu normal siklus operasi entitas, dalam waktu 12 bulan, untuk diperdagangkan, dan entitas tidak memiliki hak tak bersyarat untuk menunda pelunasan atas kewajiban tersebut minimal 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Entitas menyajikan kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Neraca dapat berisi pengungkapan atas pos-pos yang terbagi atas klasifikasi yaitu: kelompok aset tetap; jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat, persediaan yang menyajikan jumlah persediaan untuk dijual, bahan baku dan persediaan dalam produksi secara terpisah, kewajiban imbalan kerja dan estimasi lainnya, serta kelompok ekuitas.

## 2. Laporan laba rugi

Dalam laporan laba rugi, semua pos penghasilan dan beban yang diakui selama suatu periode harus dicatat, kecuali jika SAK ETAP mengharuskan sebaliknya. SAK ETAP memuat aturan yang berbeda dalam mengatasi

koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang dicatat sebagai penyesuaian pada periode sebelumnya, dan bukan dianggap sebagai bagian dari laba atau rugi pada periode di mana perubahan tersebut terjadi.

Laporan laba rugi memuat pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Entitas diwajibkan menyajikan pos-pos tersebut dalam susunan judul dan sub jumlah lainnya jika penyajian atas pos tersebut dianggap relevan untuk pemahaman terkait kinerja keuangan entitas. Entitas dilarang untuk menyajikan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa baik dalam laporan laba rugi maupun catatan atas laporan keuangan.

Entitas menyajikan analisis biaya dalam pengelompokan yang didasarkan pada sifat maupun fungsi biaya di dalam entitas, yang akan memberikan informasi yang lebih dapat diandalkan dan relevan. Beban yang disajikan sesuai dengan fungsi harus mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.

### 3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas mencatat pendapatan atau kerugian yang dihasilkan dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas dalam periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Selain itu, laporan perubahan ekuitas (sesuai dengan format yang

digunakan oleh entitas) juga memuat informasi tentang investasi, dividen, dan distribusi lainnya yang diberikan kepada pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Selain laporan perubahan ekuitas, pada BAB yang sama, SAK ETAP mengatur penyajian laporan laba rugi dan saldo laba. SAK ETAP mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

#### 4. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi historis tentang perubahan kas dan setara kas, yang secara terpisah menunjukkan perubahan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Setara kas tersebut terdiri dari investasi yang sangat likuid, memiliki jangka waktu pendek, dan tidak ditujukan untuk kegiatan investasi lainnya.

Investasi yang digolongkan sebagai setara kas adalah investasi yang akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sejak tanggal pembelian. Cerukan bank yang umumnya digolongkan dalam aktivitas pendanaan pinjaman dapat digolongkan sebagai setara kas jika cerukan bank tersebut dapat dicairkan kapan saja dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan kas entitas.

Aktivitas arus kas yang digolongkan sebagai kegiatan operasional merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan

bagi entitas. Karenanya, arus kas kegiatan operasi umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Aktivitas investasi pada arus kas berasal dari pergerakan kas yang berhubungan dengan sumber data yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Kegiatan pendanaan adalah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, pembayaran kas pada pemegang saham, penerbitan dan pelunasan pinjaman, dan sebagainya.

#### 5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi tambahan yang disajikan bersama dengan laporan keuangan. Catatan tersebut berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan memberikan informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi kriteria untuk diakui dalam laporan keuangan.

SAK ETAP mensyaratkan CaLK untuk menyajikan informasi yang menerangkan dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. CaLK disusun secara sistematis dan praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan dijelaskan dan saling merujuk dengan informasi dalam CaLK. Secara umum, informasi dalam CaLK disusun secara berurutan sebagai berikut:

- a. Pernyataan atas kesesuaian laporan keuangan dengan SAK ETAP
- b. Ringkasan atas kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan

- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan pos-pos tersebut pada tiap komponen laporan keuangan, dan
- d. pengungkapan lainnya.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Simatupang dan Purba (2018) telah melakukan penelitian serupa dengan penelitian yang penulis lakukan dengan objek penelitian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMPN 7 Pematang Siantar. Penelitian disusun dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan penyajian laporan keuangan di KPN SMPN 7 Pematang Siantar. Penelitian ini menarik kesimpulan dari perbandingan antara penyajian laporan keuangan menurut SAK-ETAP dan Peraturan Menteri KUKM Nomor 12 Tahun 2016. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen terkait laporan keuangan dari KPN SMPN 7 Pematang Siantar. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara dan observasi terhadap responden yang merupakan pengurus koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangan di KPN SMPN 7 Pematang Siantar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh objek penelitian masih belum sesuai dengan standar yang terdapat pada SAK ETAP.

Siagian dan Pangemanan (2016) melakukan penelitian serupa pada objek penelitian Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Sulut Go. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan Kopkar Bank Sulut Go Pada Tahun 2012 dan 2015. Dalam laporan keuangan tersebut, ditemukan kesalahan dalam mengklasifikasikan pos akun, pembaruan

laporan arus kas yang tidak konsisten, dan fakta bahwa CaLK tidak disajikan. Berdasarkan tinjauan tersebut disimpulkan bahwa laporan keuangan Kopkar Bank Sulut Go belum sesuai dengan standar pada SAK ETAP. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif, metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, evaluasi, dan perbandingan penyajian laporan keuangan Kopkar Bank Sulut Go dengan SAK ETAP.